

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2016)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan kesatu. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid I*, (Jakarta: PT. Djambatan Jakarta, 2009)
- Dominikus Rato, *Hukum benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2016)
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmata, Jilid I*, Cetakan kedua (Jakarta: Ind. Hill-Co, 2004)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006)
- Hatta Isnani Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan kesatu, (Jakarta: Kencana, 2020)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- _____, *Hukum Agraria*, (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020)
- Jimmy Jose Sembring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Cetakan kesatu, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah & Perizinannya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011)
- Salim HS, *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh, (Jakarta: Intermasa, 2004)

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2017)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1996 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peranahan Nasional No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jurnal:

I Gusti Bagus Yoga Prawira, "*Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah*", Jurnal IUS Vol 4 No. 1 April 2016

Purna Noor Aditama, "*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*", Jurnal Lex Renaissance Vol. 3 No.1 Januari 2018

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Putusan No: 206/Pdt.G/2012/PN.Slmn

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan Daryono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Online*, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 20.22 WIB

Hasil wawancara dengan Puspita Mustikasari, Notaris dan PPAT, *Online*, Tanggal 23 November 2021, Pukul 17.55 WIB

Hasil wawancara dengan Shinta Pangesti, Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Online*, Tanggal 4 Desember 2021, Pukul 10.30 WIB

Lain-lain:

SOP Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Standard Operational Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, (Karawaci: Universitas Pelita Harapan, 2019)

